



Judul : Waspada! kejahatan keuangan jelang pemilu
Tanggal : Jumat, 10 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Waspada! Kejahatan Keuangan Jelang Pemilu

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mewaspada! potensi kejahatan keuangan yang meningkat jelang Pemilu 2024. Pasalnya, jelas Sahroni, perputaran uang sangat cepat di tahun pemilu menjadi celah kejahatan keuangan.

"Menjelang pemilu, perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mence-

gah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru karena khawatir ada berbagai upaya yang memang dimaksudkan untuk mengintervensi pemilu kita menggunakan dana-dana hasil kejahatan tersebut," ujarnya, kemarin.

Dana ilegal, sambung Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu, sangat mungkin digunakan untuk merusak pesta demokrasi lima tahunan untuk memicu kekacauan yang berdampak pada kualitas pemilu. "Uang haram yang dicari dengan cara ilegal su-

dah pasti dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ini dibiarkan, bisa chaos situasi Pemilu 2024," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yusufvandana mengungkapkan total transaksi terkait dengan investasi ilegal selama 2022 mencapai Rp35 triliun. Selama periode itu, PPATK telah menganalisis dan melakukan penghentian transaksi terkait dengan berbagai dugaan kasus investasi ilegal, antara lain suntikan modal alat kese-

sebagainya.

Sementara itu, berdasarkan hasil indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Provinsi Jawa Barat (Jabar) menempati urutan keempat sebagai daerah paling rawan. Dengan kerawanan tersebut, Pemprov Jabar terus melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya melalui deklarasi pemilu damai selain upaya deteksi dini. "Kami juga melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan. Sinyal (kerawanan) sekecil apa-

pun kami akan deteksi dan ditangani supaya tidak makin besar," tegasnya.

Pada kesempatan terpisah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jabar mengingatkan para calon anggota legislatif (caleg) tidak berkampanye sebelum 28 November. Meski begitu, komisioner KPUD Jabar Hedi Ardia mengatakan para caleg tetap dibolehkan melakukan sosialisasi dengan catatan tidak menyebarkan bahan kampanye yang berisi ajakan memilih hingga memuat citra diri. (AN/An/P 3)